

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN DI NAD**

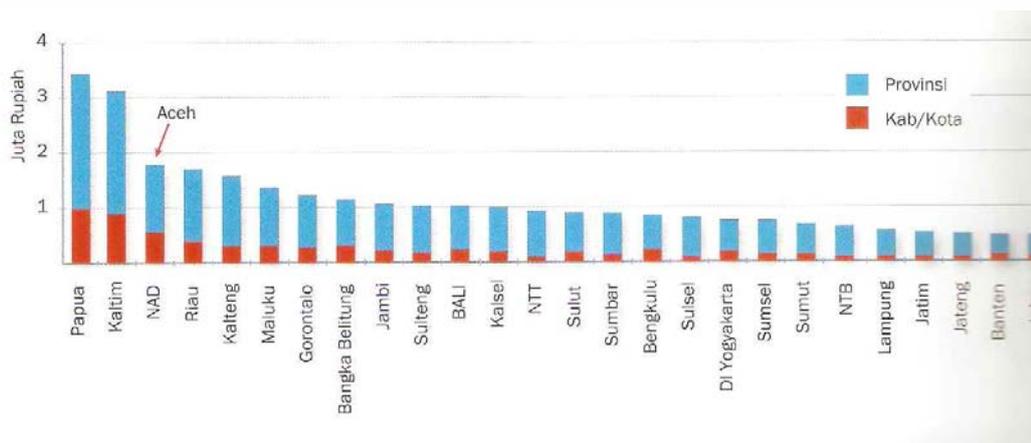
#### **4.1 Gambaran Umum Kondisi Perekonomian NAD**

Konflik kekerasan berkepanjangan selama kurang lebih 30 thn telah membuat Aceh sebagai daerah yang tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kondisi ini makin diperparah dengan dera krisis ekonomi 1997 yang kemudian berkembang lebih lanjut menjadi menjadi krisis multidimensi.

Sepanjang riwayat konflik di Aceh, sejumlah kantor pemerintah dibakar oleh mereka yang bertikai. Pertikaian politik antara TNI, selaku representasi Pemerintah Pusat, dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) juga menewaskan sejumlah rakyat sipil. Selain itu, gerakan politik sipil yang terseret ke arus pusaran konflik tersebut kerap mengeluarkan seruan mogok kerja di instansi pemerintah. Akibatnya, pelayanan publik sering terganggu dan sistem pemerintahan di Aceh timbul-tenggelam sejak lima tahun sebelum tsunami.

Di penghujung tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Desember 2004 bencana alam gempa bumi dan tsunami meluluhlantakan sebagian daerah pesisir barat pantai Aceh termasuk Banda Aceh sebagai ibukota yang terkena dampak paling parah. Dampak dari kejadian tersebut adalah hilangnya lebih dari 200.000 jiwa penduduk dalam waktu seketika, hancurnya prasarana sosial ekonomi dan budaya. Diperkirakan 97% PDRB NAD atau setara 2,5% PDB Nasional tahun 2004 musnah. (Bappeda NAD 2008).

Kondisi masyarakat Aceh sebelum ditimpa bencana kontradiktif dengan penerimaan daerah NAD yang jauh di atas rata-rata nasional. Pada 2004, Aceh memiliki sumber dana penerimaan daerah yang relatif melimpah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Grafik 4.1 menggambarkan penerimaan daerah Aceh berada pada urutan ketiga terbesar, setelah Kalimantan Timur dan Provinsi Papua.



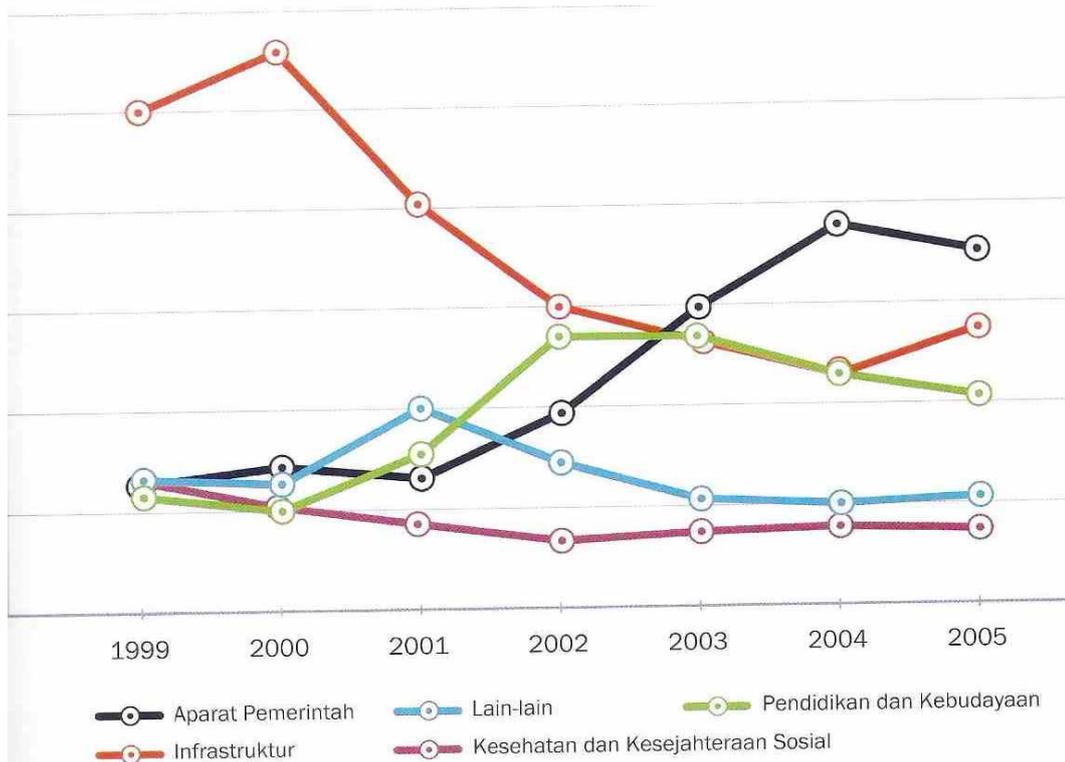
Gambar 4.1 Penerimaan APBD Provinsi di Indonesia  
(Sumber : Seri Buku BRR Aceh-Nias 2007, Buku Infrastruktur)

Tampak ketimpangan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Di satu sisi Aceh memiliki sumber penerimaan daerah nomor tiga terbesar di Indonesia, tetapi di sisi lain Aceh berada di urutan keempat daerah termiskin di negeri ini. Situasi konflik menjadi alasan paling relevan dan masuk akal sebagai kambing hitam ketimpangan itu. Tetapi fakta lain menunjukkan, ada yang salah dalam praktik pengelolaan pemerintahan di Aceh.

Anggaran daerah yang melimpah lebih banyak dipakai buat belanja operasional aparatur pemerintah daripada untuk pembiayaan pembangunan bagi kepentingan pelayanan publik.

Bila dilihat kecenderungan pada grafik 4.2 , pembiayaan operasional aparatur pemerintah terus meningkat sejak 2001, sementara belanja pembangunan infrastruktur menurun sejak tahun sebelumnya. Bahkan biaya pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial tak pernah mencapai 20 persen dari anggaran yang dimiliki setelah dipangkas pada tahun 2000. Pembiayaan sektor pendidikan sempat naik pada 2001, tetapi melorot lagi dan menjadi landai pada tahun-tahun selanjutnya.

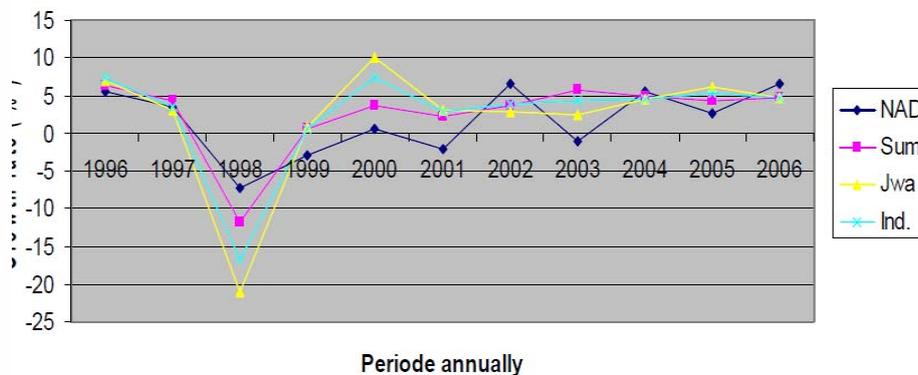
Tata kelola pemerintahan dengan pola besar pasak daripada tiang itulah yang tampaknya juga membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh sangat rendah. Analisis makro seperti ini kemudian memicu kesadaran bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) mendesak untuk dilakukan



Gambar 4.2 Alokasi Pembiayaan dan Belanja Daerah Provinsi NAD (Sumber : Seri Buku BRR Aceh-Nias, 2007)

Terlihat dalam grafik dibawah bahwa laju pertumbuhan ekonomi NAD dibandingkan daerah lain di Sumatera dan Jawa.

Rate of Growth of per Capita GRDP at 2000 Constant price (without oil and gas), 1996-2006



Gambar 4.3 Rate of growth of per capita Gat 2000 constant price (Sumber : Bappeda NAD, 2008)

Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di NAD. Dari tahun 2002 sampai dengan 2006 sektor ini selalu dihuni lebih dari 62% angkatan kerja . Berikutnya adalah sektor perdagangan dan jasa.

**Tabel 4.1**  
**Penduduk dan Lapangan Usaha Provinsi NAD**  
**2002-2006 (dalam %)**

Lapangan Usaha	2002	2004	2006
Pertanian	62,27	62,63	63,28
Pertambangan	0,06	0,04	0,03
Industri Manufaktur	4,55	4,50	4,15
Listrik, Gas, Minyak	0,06	0,04	0,04
Konstruksi	2,17	1,98	1,38
Perdagangan	16,27	17,00	16,16
Jasa	14,62	13,81	14,96
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

(Sumber : Bappeda NAD, 2008)

Sektor pertanian juga tercatat menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi NAD selama 5 tahun terakhir. Proporsi sumbangannya semakin besar dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa reformasi di bidang pertanian bisa dibidang cukup memberikan hasil positif. Tercatat di tahun 2008 kontribusi sektor ini sebesar 19 trilyun lebih.

Posisi kedua diduduki sektor pertambangan dan energi. Kita bisa maklumi karena NAD merupakan salah satu daerah penghasil gas terbesar di Indonesia melalui LNG Arun di wilayah Lhokseumawe. Di tahun 2008 kontribusi sektor ini sebesar 13 trilyun lebih.

Perdagangan, hotel dan wisata merupakan sektor ketiga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB NAD. Posisi geografis NAD yang berada di selat malaka yang notabene merupakan jalur perdagangan internasional memberikan nilai positif bagi perekonomian Aceh melalui pelabuhan sabang sebagai salah satu titiknya, NAD ikut diuntungkan dari kondisi ini. Begitu juga dengan perdagangan antar daerah di Indonesia. Sektor ini memberikan nilai tambah sebesar 10.257.600.000.000 bagi provinsi NAD.

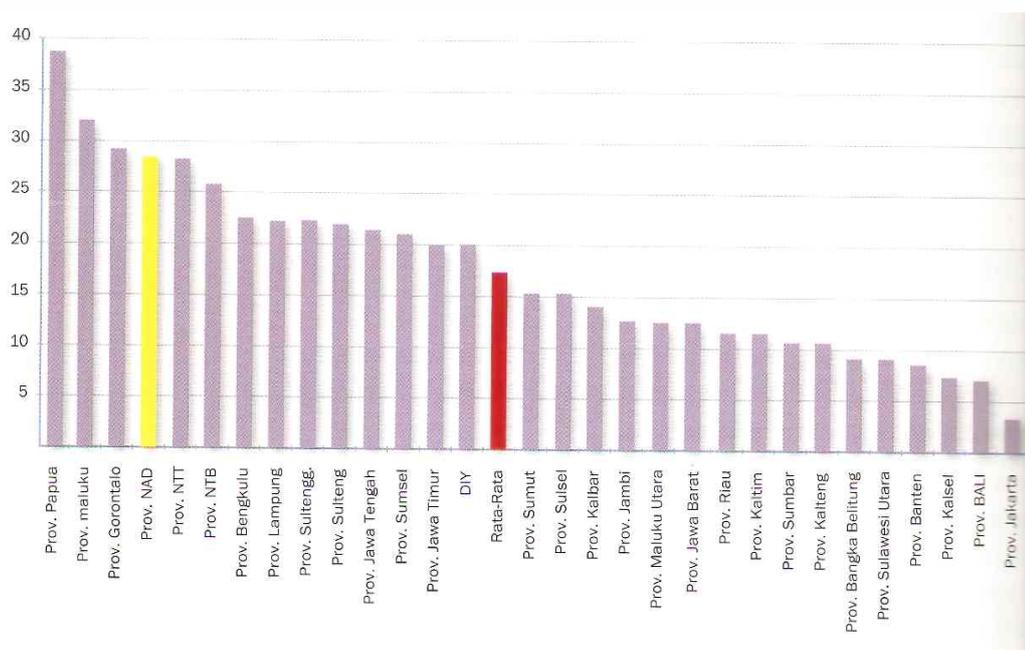
**Tabel 4.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas dasar Harga Berlaku**  
**Provinsi NAD 2007**  
**(Dalam Miliar)**

<b>Lapangan Usaha / Industrial Origin</b>		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007*)</b>	<b>2008**)</b>
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian/Agriculture	15.201,94	18.196,89	18.135,80	19.255,71
2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	13.168,94	19.624,40	15.984,35	13.879,14
	a.Pertambangan Migas/Oil & Gas Mining	12.814,27	18.978,71	15.222,62	13.092,86
	b.Penggalian dan Penggaraman/Mining and Quarrying	354,67	645,69	761,72	786,28
3	Industri Pengolahan/ Manufacturing Industries	10.258,03	8.532,04	7.935,04	8.189,80
	a.Industri Migas/Oil & Gas Industries	8.688,02	6.908,87	6.152,56	6.244,81
	b.Industri Tanpa Migas/Non Oil & Gas Industries	1.570,01	1.623,17	1.782,48	1.944,99
4	Listrik dan Air Minum/ Electricity and water supply	116,75	131,99	173,82	196,84
5	Bangunan & Konstruksi/ Building & construction	1.835,05	4.204,06	5.416,25	6.264,00
6	Perdagangan, Hotel & Restoran/Trade, Hotel & Restaurants	7.084,53	8.104,29	9.227,06	10.257,60
7	Pengangkutan & Komunikasi/ Transportation & Communication	2.932,14	4.426,53	5.742,59	6.537,25
8	Bank & Lembaga Keuangan Lainnya/Banking & Other Financial Intermediaries	838,11	1.361,18	1.351,45	1.490,76
9	Jasa-jasa/Services	5.516,11	6.205,45	7.121,96	7.459,66
<b>PDRB /GRDP</b>		<b>56.951,61</b>	<b>70.786,84</b>	<b>73.196,27</b>	<b>73.530,75</b>
<b>PDRB Non Migas/GRDP (Non Oil and Gas)</b>		<b>35.449,26</b>	<b>44.899,26</b>	<b>51.821,08</b>	<b>54.193,08</b>

(Sumber : BPS NAD, Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Angka 2008)

## 4.2 Gambaran Umum Kemiskinan di NAD

Tingkat kemiskinan di Aceh sebelum dilanda tsunami mencapai 28,4 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 4 juta orang. Angka kemiskinan ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan rata-rata nasional, yang mencapai angka 16,69 persen menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2008.



Gambar 4.4 Tingkat Kemiskinan di Indonesia  
(Sumber : Seri Buku BRR Aceh-Nias 2007)

Sementara itu, Bappenas menggolongkan 16 kabupaten di Aceh sebagai daerah tertinggal-kecuali Kota Madya Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Kota Madya Langsa (BRR Aceh Nias 2007) . Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh, sebesar 69, berada di bawah IPM nasional, yang mencapai 69,6. IPM terendah tercatat di pesisir barat dan bagian tengah, yaitu Kabupaten Simeulue (65,2), Gayo Lues (66,1), Nagan Raya (66,3), Aceh Singkil (66,5), Aceh jaya (66,8), Aceh Barat Daya (66,9), dan Bener Meriah (67,4). Wilayah Aceh bagian tengah menjadi kurang makmur dibandingkan dengan daerah pesisir utara karena keterisolasian kawasan itu dari berbagai jaringan akses dengan dunia luar.

Peta kemiskinan di Aceh berubah menjadi lebih buruk pasca tsunami. Sebelumnya, Aceh tercatat sebagai daerah dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Papua. Tsunami mendongkrak jumlah penduduk miskin sekitar tujuh persen dan menjadikan Aceh hanya unggul satu tingkat di atas Provinsi Papua. Grafik 4.3 memperlihatkan, tanpa bencana pun, tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh jauh dibawah rata-rata nasional.

Dari 23 kabupaten/kota di Provinsi NAD, ada 6 kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi, sedangkan sisanya jumlahnya sedang kecuali untuk Kota Sabang yang paling sedikit. Kabupaten dengan angka kemiskinan terbanyak adalah Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, dan Aceh Tamiang.

Di Provinsi NAD, hampir semua kabupaten/kota memiliki potensi wilayah dengan kategori rendah dan sedang, hanya ada satu kota yang memiliki kategori potensi wilayah tinggi yaitu Banda Aceh. Ini merupakan tantangan tersendiri dalam pengentasan kemiskinan jika infrastruktur dan fasilitas sosial ekonomi tidak tersedia dengan memadai. Sebagian desa-desa di kabupaten/kota di Provinsi NAD memiliki program pengentasan kemiskinan yang persentasenya bervariasi antara 6% hingga 85%.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Miskin dan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi NAD, 2007**

No	Nama Kab/Kota	Jumlah penduduk miskin	% jumlah desa yang memiliki program pengentasan kemiskinan
1	Kab. Aceh Utara	170,146	32.75
2	Kab. Aceh Timur	126,595	44.14
3	Kab. Aceh Besar	124,051	54.80
4	Kab. Pidie	120,991	32.56
5	Kab. Bireuen	97,107	47.53
6	Kab. Aceh Tamiang	78,276	75.12
7	Kab. Nagan Raya	58,978	46.64

8	Kab. Aceh Selatan	51,867	49.19
9	Kab. Aceh Barat	49,449	48.44
10	Kab. Aceh Tenggara	47,324	36.62
11	Kab. Bener Meriah	45,967	43.10
12	Pidie Jaya	43,629	35.59
13	Kab. Aceh Tengah	41,337	37.27
14	Kab. Aceh Barat Daya	34,782	81.06
15	Kab. Gayo Lues	31,353	48.61
16	Kota Lhokseumawe	26,722	85.29
17	Kab. Simeulue	25,890	70.29
18	Kab. Aceh Singkil	25,417	52.99
19	Kab. Aceh Jaya	20,138	69.01
20	Kota Langsa	19,774	45.10
21	Subulussalam	17,922	47.30
22	Kota Banda Aceh	14,670	85.56
23	Kota Sabang	7,719	5.56
	<b>Jumlah</b>	<b>1,083,704</b>	

(Diolah lebih lanjut dari Data Susenas 2007 Modul Konsumsi dan Data Podes NAD 2007)

Sebagaimana di daerah lain kemiskinan di NAD didominasi penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan rata-rata di Indonesia maka rata-rata jumlah penduduk miskin di Aceh masih jauh diatas rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ini berarti bahwa Provinsi NAD masih tergolong wilayah yang didera kemiskinan apabila perbandingannya adalah daerah-daerah lain di Indonesia.

NAD termasuk dalam daerah dengan kategori miskin di Indonesia. Bersama dengan lima provinsi lainnya yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar dalam kelompok 20-30 persen adalah Maluku (29,66) ; NTT (25,65) ; Gorontalo (24,88) ; NTB (23,8) ; NAD (23,5).

Meski demikian kategori ini masih lebih baik dibandingkan dua daerah provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin diatas 30 persen yaitu Papua (37,8) dan Papua Barat (35,12).

### 4.3 Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, presentase wanita sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (dilihat dari indikator rata-rata lamanya bersekolah kepala rumah tangga). Keempat karakteristik sosial demografi tersebut dibandingkan dengan melihat proporsi rumah tangga (*Head Count Index*) yang dikategorikan sebagai miskin dan tidak miskin.

Rumah tangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak. Karena rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kematian anak pada rumah tangga relatif tinggi akibat kurangnya pendapatan dan akses kesehatan serta pemenuhan gizi anak mereka. Dengan demikian jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan sumberdaya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak. Dari tabel 4.4 terlihat secara jumlah anggota rumah tangga miskin lebih banyak yang tinggal di pedesaan dibandingkan perkotaan.

Tampak bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di pedesaan provinsi NAD jumlahnya jauh lebih besar dari rata-rata nasional.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Kemiskinan di Provinsi NAD**  
**2004-2008 (dalam %)**

WILAYAH	2004	2005	2006	2007	2008
Nanggroe Aceh Darussalam	28,4	28,7	28,3	26,7	23,5
Aceh Perkotaan	17,6	19,10	19,0	18,7	16,6
Aceh Pedesaan	32,6	32,6	31,6	29,9	26,3
<b>INDONESIA</b>	<b>16,7</b>	<b>16,0</b>	<b>17,8</b>	<b>16,6</b>	<b>15,4</b>

(Sumber : BPS, Banda Aceh 2008)

Akhir-akhir ini mulai bergulir berbagai tuntutan dan kebijakan dalam menyikapi isu kesetaraan jender dalam menghadapi kemajuan pembangunan dan teknologi informasi yang semakin pesat. Akan tetapi secara umum peran wanita sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya biasanya akan mengalami banyak kendala dibanding dengan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan kodrat wanita yang harus berperan ganda di dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah dan ibu yang harus melahirkan, merawat, dan membesarkan anak-anaknya. Dari tabel 4.5 terlihat bahwa distribusi persentase wanita sebagai kepala rumah tangga miskin pada tahun 2007 mencapai 50,05 persen sedangkan distribusi persentase laki-laki sebagai kepala rumah tangga miskin sebesar 49,50 persen. Jumlah ini cukup berimbang apabila dilihat proporsinya. Selain itu juga terlihat adanya kecenderungan bahwa persentase wanita sebagai kepala rumah tangga di perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan, hal ini terjadi baik pada kelompok rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah dan distribusi persentase penduduk miskin**  
**Menurut Jenis kelamin**  
**Provinsi NAD 2007**

<b>Komposisi Penduduk Miskin berdasarkan Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (000)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Laki-laki	541,3	49,95
Perempuan	542,4	50,05
<b>Total L+P</b>	<b>1.083,7</b>	<b>100</b>

(Sumber : Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007)

#### **4.4 Karakteristik Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk memperoleh gambaran mengenai seberapa jauh kesempatan memperoleh pendidikan telah dirasakan oleh masyarakat NAD maka

bisa dilihat dari beberapa indikator diantaranya Angka Melek Huruf , Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Putus Sekolah.

Selain itu hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, karena pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin. Karakteristik pendidikan yang bisa dianalisa dalam Susenas adalah persentase penduduk miskin dan tidak miskin dalam kemampuan membaca dan menulis.

Penduduk yang tergolong miskin dan buta huruf tercatat sebesar 1,23 persen pada usia 15-24 tahun dan 4,88 persen pada kelompok usia 15-55 tahun. Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa provinsi NAD memiliki angka melek huruf diatas rata-rata nasional dan angka partisipasi sekolah diatas rata-rata nasional. Ini merupakan kelebihan provinsi NAD meski tergolong wilayah yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi.

**Tabel 4.6**  
**Angka Melek Huruf Provinsi NAD Tahun 2007**

Kategori Rumah Tangga	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15-24 Tahun	15-55 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Miskin	98,77	95,12	98,07	86,88
Tidak Miskin	99,08	97,19	99,38	97,15
Total	99,00	96,68	98,93	93,90
Rata2 Kategori Miskin Indonesia	97,28	89,10	93,72	68,13
Rata2 Kategori Tidak Miskin Indonesia	99,13	96,42	98,66	88,07
Rata2 Total Indonesia	98,84	95,34	97,60	84,26

(Sumber : Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007)

Pada tabel 4.7 disajikan distribusi karakteristik tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut daerah. Terlihat bahwa persentase kepala rumah tangga miskin yang tidak tamat SD dan tamat SD berturut-turut sebesar 31,77 persen dan 37,68 persen. Indikasi ini menunjukkan

bahwa mereka yang tergolong miskin cenderung berpendidikan rendah. Perubahan kebijakan wajib belajar 9 tahun juga turut berpengaruh terhadap distribusi kepala rumah tangga menurut tingkat pendidikan terakhirnya meskipun pergeseran tersebut belum mampu membebaskan mereka dari kemiskinan. Namun ada kecenderungan dimana persentase kepala rumah tangga yang tamat SLTP yang tergolong rumah tangga miskin semakin kecil dan lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

**Tabel 4.7**  
**Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga yang Masuk Kategori Miskin**  
**Provinsi NAD 2007**

<b>Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga yang Masuk Kategori Miskin</b>	<b>Jumlah (000)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak/belum tamat SD	344,3	31,77
SD	408,3	37,68
SLTP	195,9	18,08
SLTA	126,5	11,67
Diatas SLTA	8,7	0,8
<b>Total</b>	<b>1.083,7</b>	<b>100</b>

(Sumber : Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007)

Disamping distribusi rumah tangga miskin menurut pendidikan tertinggi kepala rumah tangga dapat dilihat pula *Head Count Index* (HCI) untuk masing-masing pendidikan kepala rumah tangga. Nilai HCI untuk masing-masing jenjang pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tercatat untuk tidak tamat SD sebesar 31,77 persen, tamat SD sebesar 37,68 persen, tamat SLTP sebesar 18,08 persen, tamat SLTA sebesar 11,67 persen, dan tamat Perguruan Tinggi sebesar 0,8 persen.

**Tabel 4.8**  
**Angka Putus Sekolah Menurut kelompok Usia**  
**Provinsi NAD Tahun 2007**

Kategori Rumah Tangga	Angka Putus Sekolah	
	7-12 Tahun	13-15 Tahun
(1)	(2)	(3)
Miskin	0,80	4,17
Tidak Miskin	0,23	0,72
Total	0,42	1,76
Rata2 Kategori Miskin Indonesia	1,78	11,22
Rata2 Kategori Tidak Miskin Indonesia	0,38	2,81
Rata2 Total Indonesia	0,67	4,21

(Sumber : Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007)

Angka putus sekolah di provinsi NAD didominasi oleh kelompok masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin. *Gap* cukup jauh antara kelompok miskin dan tidak miskin dalam hal putus sekolah terjadi pada usia 13-15 tahun atau bisa dikatakan pada usia SLTP dan SLTA tingkat drop out di kalangan pelajar yang tergolong miskin cukup tinggi meskipun angka 4,7 persen ini masih lebih rendah dibandingkan angka *drop out* rata-rata nasional.

#### 4.5 Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga.

Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan.

**Tabel 4.9**  
**Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin**  
**Menurut Lapangan pekerjaan Provinsi NAD 2007**

<b>Lapangan Pekerjaan Rumah Tangga Miskin</b>	<b>Jumlah (000)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak Bekerja	66,1	6,10
Pertanian	74,5	68,75
Industri	26,8	2,48
Lainnya	245,7	22,67
<b>Total</b>	<b>1.083,7</b>	<b>100</b>

(Sumber : Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007)

Distribusi rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga disajikan pada Tabel 4.9. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mereka yang tidak bekerja sebesar 6,10 persen, bekerja di sektor pertanian sebesar 68,75 persen, bekerja di sektor industri sebesar 2,48 persen, dan selebihnya 22,67 persen bekerja di sektor lainnya. Pola distribusi tersebut mengindikasikan bahwa lebih dari separuh kepala rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, sehingga prioritas penyelesaian masalah kemiskinan adalah dengan membenahi sektor yang dihuni oleh sebagian besar penduduk itu menjadi penting.

Apabila angka tersebut dirinci lagi menurut daerah, terdapat perbedaan yang sangat berarti antara daerah perkotaan dan pedesaan pada sektor pertanian, dimana 30,02 persen di perkotaan dan 68,99 persen di pedesaan. Jadi, secara umum mengindikasikan bahwa sebagian besar orang miskin bekerja di sektor pertanian dan berdomisili di pedesaan.

**Tabel 4.10**  
**Persentase Pekerja Informal dan Formal**  
**Provinsi NAD 2007**

<b>Lapangan Pekerjaan Rumah Tangga Miskin</b>	<b>Persentase (%)</b>
Informal	67,42
Formal	32,58
Rata-rata Pekerja Informal Indonesia	60,06
<b>Total</b>	<b>100</b>

(Sumber : Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007)

Pola distribusi rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga juga menunjukkan bahwa sektor informal mendominasi. Hanya 32,58 persen kepala rumah tangga miskin yang bekerja di sektor formal. Selebihnya sebanyak 67,42 persen bekerja di sektor informal. Angka ini berada di atas rata-rata nasional bagi pekerja informal yaitu sebesar 60,06 persen. Bisa dikatakan bahwa pekerjaan kepala rumah tangga miskin sebagian besar berada di wilayah informal.

Apabila distribusi rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga ditinjau menurut daerah, terlihat bahwa persentase rumah tangga miskin untuk sektor pertanian di perkotaan lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 16,63 persen dan 73,30 persen. Sedangkan rumah tangga miskin di sektor industri dan lainnya tercatat di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan.

Status pekerjaan juga dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Ada indikasi kuat bahwa mereka yang berstatus pengusaha akan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Status pekerjaan dianggap sebagai cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut status pekerjaan utama kepala rumah tangga yang disajikan pada table 4.19 terlihat bahwa 54,22 persen diantaranya berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak bayar ; 1,78 persen berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar ; 31,80 persen berstatus sebagai pekerja dibayar (buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas (baik di pertanian maupun di non pertanian) ; dan hanya 1,58 persen yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar. Secara umum terlihat bahwa mereka yang berstatus sebagai berusaha jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang berstatus sebagai pekerja, baik pada rumah tangga miskin maupun pada rumah tangga tidak miskin.

Apabila ditinjau menurut daerah, ada perbedaan yang sangat signifikan pada rumah tangga miskin yang berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha

dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak bayar, berstatus sebagai pekerja dibayar (buruh/karyawan/pegawai), dan pekerja bebas. Kepala rumah tangga miskin yang berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar tercatat 40,86 persen di perkotaan dan 60,63 persen di pedesaan. Sebaliknya kepala rumah tangga miskin yang berstatus sebagai pekerja dibayar dan pekerja bebas tercatat sebesar 41,40 persen di perkotaan dan 27,19 persen di pedesaan.

Pola yang sama juga terjadi pada distribusi rumah tangga tidak miskin berdasarkan status pekerjaan utama kepala rumah tangganya di masing-masing daerah. Terlihat bahwa persentase rumah tangga miskin yang berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar lebih besar dibandingkan dengan persentase rumah tangga tidak miskin yang berstatus sama. Hal yang sebaliknya berlaku pada rumah tangga di luar yang berstatus berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar dimana persentase rumah tangga miskin lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Perbedaan yang signifikan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin juga berlaku baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Hasil pengolahan Susenas juga menyajikan angka *Head Count Index* untuk masing-masing kategori status pekerjaan. Untuk rumah tangga yang berstatus berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar nilai *Head Count Index* tercatat sebesar 17,36 persen. juga terlihat nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah sebesar 5,96 persen ; untuk yang berstatus sebagai pekerja dibayar dan pekerja bebas sebesar 13,19 persen ; dan 16,04 persen untuk yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar. Secara umum mengindikasikan bahwa mereka yang berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar cenderung lebih miskin dibanding mereka yang berstatus pekerja.

Apabila ditinjau menurut daerah, *Head Count Index* pada masing-masing status pekerjaan utama di perkotaan tercatat lebih rendah dibanding di pedesaan. Angka *Head Count Index* rumah tangga miskin yang status pekerjaan utama kepala rumah tangganya berstatus berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh

tidak tetap/buruh tidak dibayar tercatat sebesar 14,39 persen di perkotaan dan 18,60 persen di perdesaan. Tampak pula bahwa persentase rumah tangga miskin dari mereka yang berstatus pekerjaan kepala rumah tangganya sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar jauh lebih kecil dibanding mereka yang memiliki status pekerjaan utama yang lainnya.

#### **4.6 Karakteristik Fasilitas Perumahan**

Rumah yang sehat adalah rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan. Rumah dan lingkungan yang sehat, tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan seluruh anggota keluarga yang menempatinnya. Ada beberapa indikator perumahan yang menunjukkan rumah sehat antara lain : fasilitas buang air, air bersih, dan luas lantai.

Ketersediaan jamban menjadi adalah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Di samping ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yang dibedakan atas jamban bersama, dan jamban umum/tidak ada.

Dilihat dari distribusi rumah tangga menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas tampak bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri tercatat sebesar 56.05 persen dan yang menggunakan jamban bersama sebesar 8.08 persen (Tabel 4.11). Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban tercatat sebesar 8.22 persen. Tingginya persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban mencerminkan rendahnya kemampuan ekonomi rumah tangga.

Jika distribusi rumah tangga ditinjau menurut daerah tampak bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama secara nasional pada tahun 2007 ada sebanyak 72,81 persen. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi terbanyak rumah tangganya yang menggunakan jamban sendiri / bersama (93,06 persen), sedangkan terendah ada di Provinsi Gorontalo (48,02 persen)

Untuk NAD sesuai dengan tabel 4.11 rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri berjumlah 56,05 persen. Terendah ada di Kabupaten Gayo Lues

yang hanya 19,11 persen rumah tangga di daerahnya menggunakan fasilitas jamban sendiri. Kabupaten Aceh tamiang tercatat sebagai daerah yang rumah tangganya memiliki proporsi terbesar dalam penggunaan fasilitas jamban sendiri yaitu sebesar 84,66 persen.

Dilihat dari distribusi rumah tangga tidak miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas jamban tampak bahwa rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri tercatat sebesar 64,42 persen. Sedangkan yang menggunakan jamban bersama tercatat sebesar 13,03 persen dan 22,55 persen sisanya menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas jamban sama sekali. Distribusi persentase rumah tangga miskin yang telah menggunakan jamban sendiri masih jauh lebih kecil dibanding pada rumah tangga tidak miskin. Indikasi tersebut menguatkan dugaan bahwa rumah tangga miskin memiliki keterbatasan dalam penyediaan fasilitas jamban sendiri sebagai salah satu fasilitas penting untuk dapat dikategorikan sebagai rumah sehat.

Jika dilihat menurut daerah, tercatat persentase rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan, yaitu 75,41 persen dibanding 55,79 persen. Pola yang sama juga tampak pada rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban bersama, yaitu 15,54 persen di perkotaan dan 11,06 persen di pedesaan. Hal yang sebaliknya dan sangat signifikan berlaku pada rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas jamban, yaitu 9,04 persen di perkotaan dan 33,15 persen di pedesaan.

Dari hasil pengolahan statistik secara deskriptif juga terlihat angka *Head Count Index* menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas jamban menunjukkan bahwa terdapat 9,86 persen rumah tangga dikategorikan miskin dari jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri. Sementara itu, angka *Head Count Index* untuk jamban bersama sebesar 15,70 persen dan 26,55 persen untuk rumah tangga yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas jamban. Indikasi di atas menunjukkan bahwa semakin jelek penggunaan kualitas fasilitas jambannya cenderung semakin meningkat persentase rumah tangga miskinnya.

Apabila *Head Count Index* ketersediaan dan penggunaan fasilitas jamban ditinjau menurut daerah, persentase rumah tangga miskin dari jumlah rumah

tangga yang menggunakan jamban sendiri lebih rendah di perkotaan dibanding di perdesaan, yaitu 7,63 persen dibanding 12,11 persen. Pola yang sama juga terjadi pada rumah tangga miskin yang menggunakan jamban bersama, yaitu 12,51 persen di perkotaan dan 18,96 persen di perdesaan. Hal yang sebaliknya berlaku untuk rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas jamban, yaitu 33,43 persen di perkotaan dan 24,89 persen di perdesaan.

**Tabel 4.11**  
**Fasilitas Buang Air di Provinsi NAD 2007**

Kabupaten/Kota	Sendiri	Bersama	Umum	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Simeulue	50.31	6.71	6.72	36.26	100.00
2. Aceh Singkil	66.46	16.16	7.82	9.56	100.00
3. Aceh Selatan	47.83	5.25	4.22	42.70	100.00
4. Aceh Tenggara	38.16	6.93	18.61	36.30	100.00
5. Aceh Timur	62.66	7.33	3.90	26.11	100.00
6. Aceh Tengah	58.47	11.69	20.82	9.01	100.00
7. Aceh Barat	50.63	1.48	4.13	43.76	100.00
8. Aceh Besar	65.51	11.63	5.75	17.11	100.00
9. Pidie	25.46	5.70	18.64	50.20	100.00
10. Bireuen	71.74	6.49	0.51	21.25	100.00
11. Aceh Utara	52.11	7.20	4.36	36.33	100.00
12. Aceh Barat Daya	28.34	6.88	12.61	52.17	100.00
13. Gayo Lues	19.11	8.66	30.04	42.19	100.00
14. Aceh Tamiang	84.66	7.56	1.61	6.17	100.00
15. Nagan Raya	45.44	7.25	4.55	42.76	100.00
16. Aceh Jaya	60.80	3.36	17.59	18.26	100.00
17. Bener Meriah	63.17	10.71	18.47	7.65	100.00
18. Pidie Jaya	28.87	5.82	13.80	51.52	100.00
19. Banda Aceh	80.59	17.94	0.84	0.63	100.00
20. Sabang	69.55	6.39	7.40	16.66	100.00
21. Langsa	80.03	10.49	3.04	6.44	100.00
22. Lhokseumawe	70.03	9.55	3.73	16.69	100.00
23. Subulussalam	76.02	6.44	6.70	10.84	100.00
Jumlah/ Total	56.05	8.08	8.22	27.64	100.00

Sumber : BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Susenas 2007)

**Tabel 4.12**  
**Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Luas Lantai**  
**Provinsi NAD 2007**

Kabupaten/Kota Regency/City		Luas Lantai/ <i>Floor Area</i> (m <sup>2</sup> )					Jumlah/ <i>Total</i>
		≤19	20- 49	50- 99	100- 149	150+	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Simeulue	4.75	74.54	18.62	1.37	0.71	100.00
2.	Aceh Singkil	2.86	44.25	39.70	8.76	4.42	100.00
3.	Aceh Selatan	0.70	30.92	46.65	16.00	5.73	100.00
4.	Aceh Tenggara	2.58	53.11	33.05	7.08	4.19	100.00
5.	Aceh Timur	2.96	66.37	26.89	2.55	1.23	100.00
6.	Aceh Tengah	3.01	47.57	37.92	7.08	4.43	100.00
7.	Aceh Barat	5.66	59.22	27.75	5.68	1.69	100.00
8.	Aceh Besar	2.42	50.28	38.41	4.68	4.21	100.00
9.	Pidie	4.17	54.39	33.33	5.46	2.66	100.00
10.	Bireuen	1.63	53.18	35.32	6.95	2.92	100.00
11.	Aceh Utara	3.75	60.33	28.35	5.46	2.12	100.00
12.	Aceh Barat Daya	1.45	46.53	35.35	11.16	5.52	100.00
13.	Gayo Lues	8.34	61.29	20.33	6.85	3.19	100.00
14.	Aceh Tamiang	1.65	53.54	39.46	4.95	0.40	100.00
15.	Nagan Raya	2.63	53.48	32.82	8.01	3.05	100.00
16.	Aceh Jaya	4.09	61.14	27.69	5.84	1.24	100.00
17.	Bener Meriah	3.17	55.76	30.82	8.48	1.78	100.00
18.	Pidie Jaya	1.89	50.47	38.86	5.78	3.01	100.00
19.	Banda Aceh	13.12	36.84	23.12	10.95	15.97	100.00
20.	Sabang	3.98	52.88	34.55	6.29	2.31	100.00
21.	Langsa	1.84	34.98	45.86	9.30	8.02	100.00
22.	Lhokseumawe	1.67	56.00	31.90	5.52	4.90	100.00
23.	Subulussalam	2.30	52.75	34.02	7.38	3.55	100.00
<b>Jumlah/ <i>Total</i></b>		<b>3.39</b>	<b>52.94</b>	<b>33.28</b>	<b>6.70</b>	<b>3.69</b>	<b>100.00</b>

(Sumber : Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2007)

**BAB V**

**PENGUJIAN MODEL KARAKTERISTIK**

**RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI NAD**

**5.1 Uji Kelas Menggunakan Turkey Grouping Test**

Di dalam analisis dependen kita sering kita dihadapkan dengan analisis data yang ingin melihat hubungan antara variabel independen (kategori/nonmetrik) dan variabel dependen (metrik/interval). Alat uji yang cocok untuk masalah ini adalah *analysis of variance*. *Analysis of variance* (Anova) merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen (metrik) dengan satu atau lebih variabel independen. Anova digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan pengaruh interaksi dari variabel independen kategorikal terhadap variabel dependen metrik. (Gozali, 2005, p59)

Dari seluruh variabel sosial ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi rumah tangga miskin, yaitu sebanyak 16 variabel, dilakukan pengujian kelas dengan menggunakan uji klasifikasi *Tukey* (*Tukey Grouping Test*). Variabel acuan yang digunakan sebagai dasar pengelompokan tersebut adalah pengeluaran rumah tangga perkapita, karena variabel tersebut dapat mencerminkan kesejahteraan masing-masing rumah tangga. Pengujian dilakukan untuk mendeteksi apakah nilai pengeluaran rumah tangga perkapita untuk pembagian kelas masing-masing variabel secara nyata menunjukkan perbedaan, sebagai dasar untuk membedakan karakter yang mencerminkan apakah kondisi rumah tangga miskin atau tidak miskin.

Sebagai contoh adalah variabel luas lantai perkapita. Dengan uji kelas menggunakan Turkey didapatkan kesimpulan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan secara statistik dalam jumlah pengeluaran konsumsi antara rumah tangga yang memiliki luas lantai  $\leq 8$  m/kapita (Rp. 243.806) dan empat klasifikasi rumah tangga lain berdasar luas lantainya berturut-turut 8-30 m/kapita memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita sebesar Rp.360.462, 30-50 m/kapita memiliki rata-rata pengeluaran Rp. 541.460 dan rumah tangga yang memiliki luas lantai perkapita  $>50$ m memiliki pengeluaran rata-rata Rp. 592.051.

Hasil pengolahan data menggunakan uji Anova one way dan Turkey grouping test juga menunjukkan bahwa nilai F hitung signifikan pada 0,05.

Turkey test memberikan informasi tambahan melalui tabel subset. Tabel ini memberikan informasi kategori variabel independen dan nilai rata-ratanya (means). Pada subset satu berisi nilai rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam sebulan. Nilai signifikan 1 untuk setiap subset menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga berbeda secara statistik jika dilihat dari kategori ciri luas lantai perkapitanya.

**Tabel 5.1 Uji Turkey terhadap Variabel Luas Lantai Perkapita**  
**PENGELUARAN KONSUMSI PERKAPITA**

Tukey HSD<sup>a,b</sup>

LUAS LANTAI PERKAPITA	N	Subset for alpha = .05			
		1	2	3	4
<=8m2 /kapita	2695	243806.0			
8-30 m2/kapita	6545		360462.5		
30-50m2/kapita	663			541610.9	
>50m2/kapita	90				592051.7
Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 304.339.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

Pada variabel Jenis Lantai, uji Turkey tidak bisa memberikan analisa dikarenakan jumlah kategori lebih kecil dari tiga yaitu hanya tanah dan bukan tanah. Posthoc hanya bisa dilakukan kalau kategori variabel independen lebih dari dua. Namun secara statistik bisa dikatakan

Untuk Variabel Jenis Dinding. Perbedaan yang cukup signifikan hanya terjadi pada jenis dinding tembok saja. Nilinya signifikan secara statistik pada  $\alpha=0,05$ . Untuk jenis dinding bambu dan kayu tidak terjadi perbedaan yang signifikan dalam nilai means pengeluaran konsumsi perkapita. Meskipun ada perbedaan dalam nominalnya. Begitu pula untuk jenis dinding lainnya dan kayu meski ada perbedaan secara nominal rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita namun tidak signifikan secara statistik.

**Tabel 5.2 Uji Turkey terhadap Variabel Jenis Dinding****PENGELUARAN KONSUMSI PERKAPITA**

jenis dinding terluas:	N	Subset for alpha = .05		
		1	2	3
Tukey HSD <sup>a,b</sup> bambu	183	252650.3		
kayu	6143	293861.2	293861.2	
lainnya	140		330059.6	
tembok	3527			434086.8
Sig.		.083	.159	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 306.428.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

Variabel Jenis atap juga memiliki kecenderungan yang sama dengan jenis dinding bahwa perbedaan ciri dalam rumah tangga berdasarkan atapnya tidak signifikan dalam pengeluaran konsumsi perkapitanya. Dari 7 (tujuh) variabel kategori independen hanya dikelompokkan oleh SPSS dalam dua subset saja yang masing-masing memiliki nilai  $p > 0,05$  yang berarti tidak signifikan secara statistik

**Tabel 5.3 Uji Turkey terhadap Variabel Jenis Atap****PENGELUARAN KONSUMSI PERKAPITA**Tukey HSD<sup>a,b</sup>

jenis atap terluas	N	Subset for alpha = .05	
		1	2
ijuk/rumbia	1395	266821.4	
lainnya	28	284420.7	
sirap	56	319767.5	
seng	7875	344050.2	
asbes	168		473277.1
genteng	259		508671.1
beton	212		518483.1
Sig.		.159	.766

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 101.529.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

Variabel Pendidikan Kepala Rumah tangga, pengukuran dengan menggunakan *Tukey Grouping Test* mengindikasikan bahwa rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan rendah tingkat kesejahteraannya secara statistik berbeda nyata sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga. Terlihat pula misalnya rumah tangga yang kepala rumah tangganya tamat SD sebesar Rp. 283.379,- dan kepala rumah tangga yang mempunyai ijazah Sarjana sebesar Rp. 579.515,- . Dari hasil uji *Tukey* dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang diindikasikan dengan pengeluaran per kapita rumah tangga. (Hasil *Tukey Grouping Test* untuk Seluruh Variabel disajikan pada Lampiran II ).

## **5.2 Analisa Karakteristik Rumah Tangga Miskin Menggunakan Metode Stepwise Discriminant Analysis.**

Diskriminan analisis merupakan bentuk regresi dengan variabel terikat berbentuk non-metrik atau kategori. (Ghozali, 2007: p185). Analisis diskriminan mempunyai asumsi bahwa data berasal dari multivariate normal distribution dan matrik kovarian kedua kategori (miskin/tidak miskin) adalah sama. Asumsi multivariate normal distribution penting untuk menguji signifikansi dari variabel diskriminator dan fungsi diskriminan. Jika data tidak normal secara multivariate, maka secara teori uji signifikansi menjadi tidak valid.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dari metode *stepwise discriminant analysis* diharapkan suatu model yang dapat mendekati pada perbedaan sifat atau ciri miskin tidaknya suatu rumah tangga. Menyaring 16 variabel yang sehingga didapatkan variabel yang operasional dan signifikan secara statistik.

. **Tabel 5.3 Analisa Stepwise Discriminant****Tests of Equality of Group Means**

	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
LUAS LANTAI PERKAPITA	.907	1025.237	1	9991	.000
jenis lantai terluas:	.995	49.993	1	9991	.000
jenis dinding terluas:	.968	332.449	1	9991	.000
jenis atap terluas	.986	138.619	1	9991	.000
penggunaan fasilitas tempat buang air be	.975	255.884	1	9991	.000
sumber air minum:	.960	418.703	1	9991	.000
bahan bakar/energi utama untuk memasak	.920	869.904	1	9991	.000
status penguasaan bangunan tempat tinggal	.995	53.139	1	9991	.000
dapat membaca dan menulis:	1.000	.400	1	9991	.527
jenis pendidikan tertinggi yg pernah did	.951	513.743	1	9991	.000
lapangan usaha/bidang pekerjaan utama?	.967	345.781	1	9991	.000
status/kedudukan dlm pekerjaan utama?	.990	103.049	1	9991	.000
apakah ada art/mantan art yg pernah/sedang menjadi TKI	1.000	.008	1	9991	.930
apakah art yg menerima kredit usaha dlm	.996	41.888	1	9991	.000
apakah rt pernah membeli beras murah/ras	.952	504.406	1	9991	.000
apakah ada art yang mempunyai telepon se	.928	775.223	1	9991	.000

Output SPSS diatas adalah *test of quality of groups* means digunakan untuk melihat apakah secara univariate ada perbedaan nyata kondisi kemiskinan suatu rumah tangga (Miskin/Tidak miskin) dilihat dari 16 variabel independen secara bersama-sama. Ternyata didapatkan kesimpulan bahwa seluruh variabel mampu membedakan ciri miskin dan tidaknya (*mendiscriminate*) suatu rumah tangga kecuali 2 (dua) variabel yaitu literasi (kemampuan membaca/menulis) dan variabel nakerwan (adanya ART yang menjadi TKI). Ini bisa dilihat dari nilai wilks' lambda yang memiliki signifikansi dibawah 0,05. Sedangkan untuk dua variabel literasi dan nakerwan memiliki nilai  $p > 0,05$  sehingga tidak signifikan secara statistik.

**Tabel 5.4 Test Results**

Box's M		1611.973
F	Approx.	35.775
	df1	45
	df2	85962084.
		622
	Sig.	.000

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.

Hasil uji box's M menunjukkan bahwa nilai F sebesar 35,775 dan signifikan pada 0,00 dan probabilitas ini dibawah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa matriks covariance antar group memang berbeda secara nyata dan hal ini menyalahi asumsi diskriminan. Namun demikian analisis fungsi diskriminan tetap *robust* meski asumsi homogeneity tidak terpenuhi.

Oleh karena tujuan kita ingin menentukan variabel-variabel yang paling efisien dalam membedakan miskin dan tidaknya suatu rumah tangga, maka digunakan prosedur *stepwise malahanobis distance* akan digunakan untuk prosedur *stepwise* guna menentukan variabel mana yang memiliki kekuatan mendiskriminasi. Prosedur *stepwise* dimulai dengan memasukkan variabel yang akan memaksimumkan *Malahanobis Distance* antar group. Dalam hal ini minimum significant value 0,05 digunakan sebagai syarat entry variabel dan *Malahanobis D2* digunakan untuk memilih variabel.

Dari output SPSS maka didapatkan nilai maksimum Mahalanobis Distance D2 jatuh kepada variabel X1 (luas lantai perkapita). Kemudian berturut turut berdasarkan nilai D2 Mahalanobis adalah Step kedua adalah variabel X7 (bahan bakar/energi utama untuk memasak), step ketiga adalah variabel X16 (Ada ART yang memiliki telepon seluler), X10 (jenjang pendidikan tertinggi kepala rumah tangga), X6 (sumber air minum), X3 (jenis dinding terluas), X15 (pernah mendapatkan raskin), X8 (status penguasaan rumah), X11 (lapangan usaha),.

Jadi yang signifikan berdasar *stepwise discriminant* ada 9 variabel tersebut. Variabel-variabel ini mampu membedakan ciri-ciri kondisi kemiskinan suatu rumah tangga berdasarkan pada nilai Wilk's lambda dan minimum Mahalanobis distance.

Tabel 5.5 Hasil Pengolahan Stepwise berdasar mahalanobis

**Variables Entered/Removed<sup>a,b,c,d</sup>**

Step	Entered	Min. D Squared					
		Statistic	Between Groups	Exact F			
				Statistic	df1	df2	Sig.
1	LUAS LANTAI PERKAPITA	.529	Tidak Miskin and Miskin	1025.237	1	9991.000	3.07E-214
2	bahan bakar/energi utama untuk memasak	.873	Tidak Miskin and Miskin	845.153	2	9990.000	.000
3	apakah ada art yang mempunyai telepon se	1.026	Tidak Miskin and Miskin	662.013	3	9989.000	.000
4	jenis pendidikan tertinggi yg pernah did	1.046	Tidak Miskin and Miskin	506.411	4	9988.000	.000
5	sumber air minum:	1.061	Tidak Miskin and Miskin	410.854	5	9987.000	.000
6	jenis dinding terluas:	1.071	Tidak Miskin and Miskin	345.567	6	9986.000	.000
7	apakah rt pernah membeli beras murah/ras	1.080	Tidak Miskin and Miskin	298.529	7	9985.000	.000
8	status penguasaan bangunan tempat tinggal	1.087	Tidak Miskin and Miskin	262.871	8	9984.000	.000
9	lapangan usaha/bidang pekerjaan utama?	1.090	Tidak Miskin and Miskin	234.298	9	9983.000	.000

At each step, the variable that maximizes the Mahalanobis distance between the two closest groups is entered.

- a. Maximum number of steps is 32.
- b. Minimum partial F to enter is 3.84.
- c. Maximum partial F to remove is 2.71.
- d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.

Model yang terbentuk memang fit secara keseluruhan, namun bila ditinjau masing-masing parameter dari variabel, terdapat 7 variabel yang diduga kurang sesuai menjelaskan variabel kemiskinan. Variabel tersebut adalah jenis lantai (X2), jenis atap (X4), fasilitas buang air besar/ jamban (X5), literasi atau kemampuan baca tulis (X9), adanya ART yang menjadi Tenaga Kerja Luar Negeri (X13), Akses kredit usaha (X14), Status Pekerjaan (X12)

Jika dilihat dari nilai *canonical* dan *unstandardized coefficient discriminant function* maka model yang terbangun untuk karakteristik rumah tangga miskin ini adalah :

$$D_i = 0,166 + 1,056X_1 - 0,170 X_3 + 0,5X_6 - 0,246 X_7 + 0,045X_8 + 0,33X_{10} + 0,10X_{11} + 0,220X_{15} - 0,5698X_{16} \dots \dots \dots (5.1)$$

Dimana :

$D_i$  = Nilai (skor) diskriminan dari responden (objek) ke-i  
 $X_1$  = Luas lantai Perkapita ;  $X_7$  = Jenis dinding terluas ;  $X_6$  Sumber air minum ;  
 $X_7$  = Bahan bakar utama dalam memasak ;  $X_8$  = Status Penguasaan Rumah/asset tetap ;  $X_{10}$  = Jenis pendidikan tertinggi KRT;  $X_{11}$  = lapangan Usaha Pekerjaan Utama KRT ;  $X_{15}$  = pernah mendapatkan bantuan raskin ;  $X_{16}$  = Ada ART yang memiliki Telpon Seluler

**Tabel 5.6 Canonical Discriminant Function Coefficients**

**Canonical Discriminant Function Coefficients**

	Function
	1
LUAS LANTAI PERKAPITA	1.056
jenis dinding terluas:	-.170
sumber air minum:	-.050
bahan bakar/energi utama untuk memasak	-.246
status penguasaan bangunan tempat tinggal	.045
jenis pendidikan tertinggi yg pernah did	.033
lapangan usaha/bidang pekerjaan utama?	.010
apakah rt pernah membeli beras murah/ras	.220
apakah ada art yang mempunyai telepon se	-.698
(Constant)	.166

Unstandardized coefficients

### 5.3 Analisa Karakteristik Rumah Tangga Miskin Menggunakan Metode Stepwise Binnary Logistic Regression.

Binnary Logistic Regression atau selanjutnya disebut dengan Logistic Regression sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu kita ingin menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat dipredikisi dengan variabel bebasnya. (Ghozali, 2007)

Namun demikian, asumsi *multivariate normal* distribution yang tidak dapat dipenuhi karena variabel bebasnya merupakan kategori metrik dan non metrik dapat dipenuhi oleh analisis dengan menggunakan logistic regression karena dalam analisis ini tidak diperlukan asumsi normalitas data pada variabel bebasnya (Ghozali, 2007)

Menilai model fit dapat dilihat dari nilai statistik  $-2\log L$  yaitu tanpa variabel hanya konstanta saja maka nilai  $-2\log L$  sebesar 11515,036 (Tabel 5.7). Setelah dimasukkan variabel baru maka nilai  $-2\log L$  turun menjadi 9458,09 (Tabel 5.8).

**Tabel 5.7**

**Iteration History<sup>a,b,c</sup>**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
Step 1	11528.374	-.948
0 2	11515.040	-1.029
3	11515.036	-1.031
4	11515.036	-1.031

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 11515.036

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Model fit juga bisa diinterpretasikan melalui nilai Nagelkerke's R yang dalam model multiple regression berarti nilai adjusted  $R^2$  nya. Output SPSS memberikan nilai sebesar 0,272 yang berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 27% secara serentak.

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	10510.586 <sup>a</sup>	.096	.140
2	9921.603 <sup>b</sup>	.147	.215
3	9634.424 <sup>b</sup>	.172	.251
4	9563.831 <sup>b</sup>	.177	.259
5	9523.654 <sup>b</sup>	.181	.264
6	9496.219 <sup>b</sup>	.183	.267
7	9479.616 <sup>b</sup>	.184	.269
8	9472.354 <sup>b</sup>	.185	.270
9	9467.274 <sup>b</sup>	.185	.271
10	9462.116 <sup>b</sup>	.186	.271
11	9458.090 <sup>b</sup>	.186	.272

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

b. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Berdasarkan metode logistic regression dan adjustment/pertimbangan lainnya seperti yang dijelaskan dimuka maka variabel-variabel yang mencirikan kondisi kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi 11 variabel, yaitu : ciri tempat tinggal, kepemilikan terhadap aset tetap (rumah), kegiatan ekonomi dan penghasilan, pendidikan kepala rumah tangga, dan keikutsertaan dalam program sosial pemerintah.

Dalam tabel klasifikasi 2x2 disajikan misklasifikasi observasi dan prediksi sebagaimana bisa kita lihat pada tabel 5.9. yaitu perhitungan nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Cara membaca kita lihat pada step 11. menurut observasi rumah tangga yang dikategorikan "Tidak Miskin" berjumlah 7.365 (6748+617), sedangkan hasil prediksi hanya 6.755 rumah tangga. Jadi ketepatan klasifikasi sebesar  $6.755 / 7.365 = 91,6$  persen.

Sedangkan kita memprediksi karakter rumah tangga "Miskin" berdasar observasi sebesar 2.628 (1725+906) sedangkan hasil prediksi menunjukkan 903 rumah tangga. Jadi ketepatan klasifikasi sebesar 34,4 persen atau secara keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah 76,6 persen.

Tabel 5.9 Classification Table

Observed			Predicted		
			GK KEMISKINAN (K+D)		Percentage Correct
			Tidak Miskin	Miskin	
Step 1	GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	7365	0	100.0
		Miskin	2628	0	.0
		Overall Percentage			73.7
Step 2	GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	6642	723	90.2
		Miskin	1671	957	36.4
		Overall Percentage			76.0
Step 3	GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	6779	586	92.0
		Miskin	1757	871	33.1
		Overall Percentage			76.6
Step 4	GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	6795	570	92.3
		Miskin	1777	851	32.4
		Overall Percentage			76.5
Step 5	GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	6805	560	92.4
		Miskin	1786	842	32.0
		Overall Percentage			76.5
Step 6	GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	6766	599	91.9
		Miskin	1754	874	33.3
		Overall Percentage			76.5
Step 7	GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	6739	626	91.5
		Miskin	1720	908	34.6
		Overall Percentage			76.5
Step 8	GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	6750	615	91.6
		Miskin	1718	910	34.6
		Overall Percentage			76.7
Step 9	GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	6758	607	91.8
		Miskin	1726	902	34.3
		Overall Percentage			76.7
Step 10	GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	6755	610	91.7
		Miskin	1726	902	34.3
		Overall Percentage			76.6
Step 11	GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	6748	617	91.6
		Miskin	1725	903	34.4
		Overall Percentage			76.6

a The cut value is .500

Dari 16 variabel-variabel yang dimasukkan dalam analisa data tersebut, dipilih variabel yang berkorelasi kuat dengan kemiskinan menurut pendekatan kebutuhan dasar berdasarkan metode analisis regresi logistik. Dari hasil output SPSS maka dapat dibentuk suatu model yang diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi rumah tangga tergolong miskin atau tidak.

Estimasi parameter dan interpretasinya dapat dilihat pada lembar lampiran 4 tabel *Variables in the Equation*. Pada step terakhir atau langkah pengolahan ke-11 model persamaan logistic regression dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Li = \ln \left[ \frac{Pi}{1-Pi} \right] = Zi = -1,166 - 1,130X_1 - 0,149X_2 + 0,211X_3 - 0,47X_6 + 0,67X_7 + 0,255X_7 - 0,38X_8 - 0,79X_{10} - 0,13X_{11} - 0,436X_{15} + 0,852X_{16} \quad (5.2)$$

Dimana :

$Li = \ln \left[ \frac{Pi}{1-Pi} \right] = Zi$  = Probabilita Suatu Rumah Tangga Menjadi Miskin/ Tidak Miskin

X1 = Luas lantai perkapita ; X2 = jenis lantai terluas ; X3 = jenis dinding terluas ; X6 = Fasilitas buang air besar yang digunakan ; X6 = sumber air minum ; X7= bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak ; X8 = penguasaan asset / bangunan rumah ; X10 = pendidikan tertinggi KRT ; X11 = lapangan pekerjaan utama KRT ; X5= pernah/tidak nya menerima bantuan program raskin ; X16 = ada ART yang memiliki telepon seluler.

**Tabel 5.10 Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 11(k)	lantai_kap	-1.130	.048	552.472	1	.000	.323
	jenis_lantai	-.149	.074	3.993	1	.046	.862
	dinding	.211	.048	19.581	1	.000	1.235
	jamban	-.047	.021	5.172	1	.023	.954
	air_minum	.067	.014	23.111	1	.000	1.070
	bahanbakar	.255	.027	88.588	1	.000	1.290
	asset	-.038	.016	6.063	1	.014	.962
	pendidikan	-.079	.014	32.203	1	.000	.924
	pekerjaan	-.013	.005	6.394	1	.011	.987
	prograskin	-.436	.075	33.405	1	.000	.647
	handphone	.852	.068	157.730	1	.000	2.344
	Constant	-1.166	.244	22.891	1	.000	.312

Melihat hasil estimasi diatas maka terlihat bahwa variabel yang operasional dan signifikan hanya 11 variabel sedangkan 5 variabel lain tidak dimasukkan dalam persamaan model karena tidak operasional secara statistik. Estimasi model dengan 11 variabel di atas dapat dikatakan cukup baik untuk melihat karakter kemiskinan rumah tangga, dimana persentase kebenaran sejalan dengan kriteria rumah tangga miskin berdasarkan pengeluaran rumah tangga mencapai angka 76,6 persen secara keseluruhan. Ini berarti pula bila dibandingkan dengan klasifikasi berdasarkan batas garis kemiskinan yang selama ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rumah tangga miskin 23,3 persen rumah tangga mengalami salah klasifikasi (*misclassification*).

#### **5.4 Model Perbandingan Karakteristik Rumah Tangga Miskin Miskin**

##### **Menurut Metode Konseptual dan Skor**

Berdasarkan hasil uji dua metode tersebut maka metode *logistic regression* memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode *discriminant*. Maka 11 variabel terpilih akan dibandingkan variabel-variabel penentu kemiskinan berdasarkan SKPM BPS tahun 2000. Survey yang dilakukan tahun di tujuh provinsi tersebut menghasilkan 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Kedelapan variabel tersebut adalah : luas lantai per kapita, jenis lantai, air minum/ketersediaan air bersih, jenis jamban/WC, kepemilikan aset, pendapatan, pengeluaran, konsumsi lauk pauk.

Jadi pada langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil uji *logistic regression* yang diperoleh dengan klasifikasi ciri kemiskinan versi SKPM BPS. Namun dikarenakan 8 variabel SKPM tersebut tidak semuanya ada dalam 11 variabel hasil *logistic regression* maka yang dibandingkan hanya yang ada saja yaitu luas lantai per kapita, jenis lantai, air minum/ketersediaan air bersih, jenis jamban/WC, kepemilikan aset. 5 Variabel yang bisa dibandingkan secara langsung (*apple to apple*) sedangkan variabel lain diluar itu bisa dibuat kategori tersendiri.

Langkah awal untuk menganalisa perbandingan ini adalah dengan membuat sistem klasifikasi dan skoring untuk semua variabel tersebut. Agar lebih operasional di lapangan, maka sistem klarifikasi yang digunakan terdiri atas dua klarifikasi (dikotomi) dengan sistem skoring 1 dan 0. Suatu variabel diberi skor 1 apabila mengacu pada sifat atau ciri miskin dan skor 0 apabila mengacu pada sifat atau ciri-ciri tidak miskin. Sebagai contoh adalah variabel jenis lantai. Berdasarkan hasil uji kelas misalnya, diketahui bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga dengan jenis lantai tanah berbeda secara nyata dengan jenis lantai bukan tanah, maka rumah tangga yang berlantai tanah diberi skor 1 dan yang berlantai bukan tanah diberi skor 0.

Dari keseluruhan variabel yang ada yang telah diberi skor dan klasifikasi baru selanjutnya dilakukan analisa tabulasi silang dengan variabel acuan yaitu status kemiskinan rumah tangga menurut metode baku (pendekatan kebutuhan dasar-Metode BPS).

1. Luas Lantai Per Kapita
  - $\leq 8 \text{ m}^2$  (skor 1)
  - $> 8 \text{ m}^2$  (skor 0)
2. Jenis Lantai
  - Tanah (skor 1)
  - Bukan Tanah (skor 0)
3. Sumber Air Minum
  - Sumber yang sehat (skor 1)
  - Sumber yang tidak sehat (skor 0)
4. Jenis Jamban / WC
  - Tidak Punya Jamban / WC (skor 1)
  - Punya Jamban / WC (skor 0)
5. Kepemilikan rumah
  - Tidak Punya rumah (skor 1)
  - Punya Rumah (skor 0)

### 5.4.1 Luas Lantai Tempat Tinggal Per Kapita

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program STATA dan SPSS didapatkan sekitar 2.695 rumah tangga atau 25,42 persen dari seluruh rumah tangga sampel mempunyai luas lantai tempat tinggal per kapita  $\leq 8$  m<sup>2</sup>. Yang tepat dikategorikan miskin secara konseptual hanya sekitar 1.295 rumah tangga. Sementara pada rumah tangga yang mempunyai luas tempat tinggal per kapita  $> 8$  m<sup>2</sup> terdapat sekitar 7.298 rumah tangga (74,67373 persen). Untuk yang tepat dikategorikan tidak miskin secara konseptual sebesar 5.965 rumah tangga atau sekitar 80 persen.

Misklasifikasi yang didapat sekitar 27 persen. Misklasifikasi yang dimaksud dapat diinterpretasikan ada sekitar 27 persen atau 2.733 rumah tangga sampel (observasi) yang tidak sesuai pengklasifikasiannya dalam penentuan rumah tangga miskin berdasarkan variabel luas lantai.

Dari hasil uji *chi-square* memberikan hasil yang signifikan pada  $\alpha = 0,05$  dengan nilai pearson chi square 900,95 (Lampiran 5). Hal ini mengidentifikasi bahwa luas lantai tempat tinggal per kapita dengan fenomena kemiskinan tidaklah independen, atau dengan kata lain kemiskinan sangat terkait dengan luas lantai tempat tinggal per kapita.

**Tabel 5.11 Misklasifikasi Rumah Tangga Sampel Menurut Luas Lantai perkapita**

			LUAS LANTAI PERKAPITA		Total
			>8m2 perkapita	$\leq 8$ m2 perkapita	>8m2 perkapita
GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	Count	5965	1400	7365
		% within GK KEMISKINAN (K+D)	81.0%	19.0%	100.0%
	Miskin	Count	1333	1295	2628
		% within GK KEMISKINAN (K+D)	50.7%	49.3%	100.0%
Total		Count	7298	2695	9993
		% within GK KEMISKINAN (K+D)	73.0%	27.0%	100.0%
MISKLASIFIKASI					27,0 %

### 5.4.2 Jenis Lantai Rumah

Sebagaimana variabel luas lantai, variabel jenis lantainya pun terkait dengan status kemiskinan rumah tangga. Ini dapat dilihat dari hasil uji *chi-square* yang sangat signifikan pada  $\alpha = 0,05$ . Terdapat sekitar 406 rumah tangga atau sekitar 34,8 persen rumah tangga miskin secara konseptual yang mempunyai jenis lantai tanah, sedangkan pada rumah tangga yang mempunyai jenis lantai bukan tanah hanya ada sekitar 25,2 persen yang digolongkan miskin (Tabel 5.12). Sehingga misklasifikasi yang didapat sekitar 29,8 persen.

Dari hasil uji *chi-square* bisa dikatakan bahwa ciri-ciri fasilitas perumahan terutama jenis lantai melekat pada fenomena kemiskinan sebuah rumah tangga. Nilai koefisien pearson 49,574 dan nilai  $p < 0,000 < p$  tabel (0,005) sehingga bisa dikatakan bahwa signifikan secara statistik.

**Tabel 5.12 Persentase Rumah Tangga Sampel Menurut Jenis Lantai**

			JENIS LANTAI TERLUAS		Total
			Bukan Tanah	Tanah	
GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	Count	6606	759	7365
		% within JENIS LANTAI TERLUAS	74.8%	65.2%	73.7 %
		% of Total	66.1%	7.6%	73.7 %
	Miskin	Count	2222	406	2628
		% within JENIS LANTAI TERLUAS	25.2%	34.8%	26.3 %
		% of Total	22.2%	4.1%	26.3 %
Total		Count	8828	1165	9993
		% within JENIS LANTAI TERLUAS	100.0%	100.0%	100.0 %
		% of Total	88.3%	11.7%	100.0 %
<b>MISKLASIFIKASI</b>					29,8 %

### 5.4.3. Sumber Air Minum

Variabel sumber air minum memiliki misklasifikasi yang cukup besar yakni sebesar 37 persen, variabel ini pun terkait dengan status kemiskinan rumah tangga. Ini dapat dilihat dari hasil uji *chi-square* yang sangat signifikan pada  $\alpha = 0,05$  yaitu koefisien *pearson* 258,287 . Terdapat sekitar 1.325 rumah tangga atau sekitar 13 persen rumah tangga miskin secara konseptual yang mempunyai sumber air minum yang tidak sehat. Ada sekitar 2.412 rumah tangga yang memiliki sumber air minum yang tidak sehat naumn tergolong tidak miskin dan sekitar 1.303 rumah tangga miskin yang memiliki sumber air sehat.

**Tabel 5.13 Persentase RT Sampel Menurut Sumber Air Minum**

			SUMBER AIR MINUM		Total
			Sumber yang sehat	tidak sehat	
GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	Count	4953	2412	7365
		% within SUMBER AIR MINUM	79.2%	64.5%	73.7%
		% of Total	49.6%	24.1%	73.7%
	Miskin	Count	1303	1325	2628
		% within SUMBER AIR MINUM	20.8%	35.5%	26.3%
		% of Total	13.0%	13.3%	26.3%
Total		Count	6256	3737	9993
		% within SUMBER AIR MINUM	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	62.6%	37.4%	100.0%
MISKLASIFIKASI					37,4 %

### 5.4.4 Kepemilikan Jamban / WC Rumah tangga

Perbedaan yang cukup signifikan juga tampak pada variabel kepemilikan jamban dalam membedakan status kemiskinan rumah tangga. Hal ini terlihat dari hasil *chi-square* yang sangat signifikan pada  $\alpha = 0,05$  (Lampiran 5). Sekitar 15,8 persen dari seluruh rumah tangga sampel yang tidak mempunyai fasilitas jamban sendiri digolongkan miskin, sementara hanya sekitar 10,5 persen rumah tangga yang mempunyai fasilitas jamban sendiri yang digolongkan miskin (lihat Tabel 5.14).

Dengan  $df=1$  dan tingkat signifikansi 0,05 maka didapati nilai *chi square* > nilai tabel sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri katiadaan fasilitas jamban milik sendiri dan fenomena kemiskinan sangat terkait. Meskipun misklasifikasi dari konsep umum dan hasil perhitungan cukup besar yaitu sebesar 42,8 persen.

**Tabel 5.14 Persentase RT Sampel Menurut Fasilitas Buang Air Besar**

			FASILITAS BUANG AIR BESAR		Total
			Punya sendiri	Bersama/ Umum	Punya sendiri
GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	Count	4137	3228	7365
		% within FASILITAS BUANG AIR BESAR	79.7%	67.2%	73.7%
		% of Total	41.4%	32.3%	73.7%
	Miskin	Count	1053	1575	2628
		% within FASILITAS BUANG AIR BESAR	20.3%	32.8%	26.3%
		% of Total	10.5%	15.8%	26.3%
Total	Count		5190	4803	9993
	% within FASILITAS BUANG AIR BESAR		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		51.9%	48.1%	100.0%
MISKLASIFIKASI					<b>42,8 %</b>

#### 5.4.5 Kepemilikan Asset / Rumah

Dari keseluruhan sampel rumah tangga, terdapat 2.143 rumah tangga miskin yang memiliki rumah sendiri . Dan terdapat 2.030 rumah tangga yang kepemilikan rumahnya bukan milik sendiri namun tergolong tidak miskin. Sehingga misklasifikasi dalam kepemilikan asset rumah ini jika dibandingkan antara kemiskinan konseptual sebesar 41,7 persen.

Dari hasil uji chi-square memberikan hasil yang signifikan pada (Lampiran 5). Hal ini mengidentifikasi bahwa status kepemilikan rumah mempunyai kaitan erat dengan ciri kemiskinan rumah tangga.

**Tabel 5.15. Persentase Rumah Tangga Sampel Kepemilikan Rumah**

			Status kepemilikan Rumah		Total
			Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	
GK KEMISKINAN (K+D)	Tidak Miskin	Count	5335	2030	7365
		% within Status kepemilikan Rumah	71.3%	80.7%	73.7%
		% of Total	53.4%	20.3%	73.7%
	Miskin	Count	2143	485	2628
		% within Status kepemilikan Rumah	28.7%	19.3%	26.3%
		% of Total	21.4%	4.9%	26.3%
Total		Count	7478	2515	9993
		% within Status kepemilikan Rumah	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	74.8%	25.2%	100.0%
<b>MISKLASIFIKASI</b>					<b>41,7 %</b>

